



Dimaksudkan dengan kualitatif di atas adalah peserta KB baik peserta KB baru atau peserta KB aktif di lihat dari komposisi pemakaian alat kontrasepsi (mix kontrasepsi) ternyata di Bondowoso IUD menduduki urutan yang pertama, menyusul kontrasepsi PIL dan lain-lain dengan perbandingan untuk peserta KB baru IUD: 51,70%, PIL : 40,83 % dan lain-lain : 7,47 %, sedangkan untuk peserta KB aktif IUD : 55,72 %, PIL : 42,99 % dan lain-lain : 1,29 %.

Dimaksudkan melembaga di masyarakat adalah segala lapisan masyarakat menerima gagasan atau ide Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) lapisan masyarakat disini antara lain Ulama', Tokoh tokoh masyarakat, Pegawai Negeri, ABRI, Petani, Pedagang dan lain-lain.

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat semakin meningkat tentang Keluarga Berencana.
2. Adanya Pendekatan manusiawi dari tenaga program BKKBN kepada tenaga non BKKBN.
3. Peranan Ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana.
4. Kegiatan rapat koordinasi (Rakor) Keluarga Berencana yang didukung oleh para Ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat.
5. Dukungan dari suami calon akseptor.











Berdasarkan indikator-indikator di atas, bahwa peranan Ulama' dalam pembudayaan/pelembagaan program Keluarga Berencana cukup tinggi dan sangat menunjang. Hal ini dapat didukung dan sejalan dengan adanya jumlah pencapaian akseptor KB yang cukup tinggi di Kabupaten Bondowoso, khususnya di pedesaan dan daerah basis Ulama' (Curahdami, Tamanan, Prajegan dan Tlogosari). Daerah yang kurang adanya Ulama' cenderung pencapaian akseptor rendah sebagaimana daerah kecamatan Tapen, sebagai daerah IUD.

4. Kegiatan rapat koordinasi (rakor) Keluarga Berencana yang didukung oleh para Ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat.

Kegiatan rapat koordinasi (rakor) Keluarga Berencana di tingkat kecamatan sampai dengan bulan Maret 1986 rata-rata dua kali untuk setiap bulan.<sup>6</sup> Di dalam rakor tersebut dihadliri beberapa pejabat instansi setempat, seperti Kepala KUA, Kepala Kesehatan, Kepala Pertanian dan lain sebagainya. Demikian pula bapak camat tidak meninggalkan keikutsertaan para Ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat untuk diajak berbigara dalam rakor tentang pelaksanaan program pemerintah pada umumnya dan program Keluarga Berencana pada khususnya.

Dukungan para Ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat dapat dijadikan bahan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana di dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Rapat koordinasi tersebut tidak hanya dilaksanakan di tingkat-tingkat kecamatan, di tingkat-tingkat

---

<sup>6</sup>Kantor BKKN Kabupaten Bondowoso, data tanggal 10 Mei 1986.

desapun juga dilaksanakan rapat koordinasi dengan istilah "Rembug Desa". Pada rembug-rembug desa tersebut juga mendapat dukungan para Ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat desa.

Bapak Camat untuk memasukkan program pemerintah pada umumnya dan program KB pada khususnya dengan sistem "Tilik Dukuh", datang ke Pedukuhan-pedukuhan bersama PPLKB, PLKB, Kepala KUA dan pejabat lain untuk berbicara langsung kepada Ulama', tokoh masyarakat dan masyarakat secara santai atau informal. Terutama pada daerah-daerah.

Pendekatan secara informal kepada mereka itulah, akan lebih memberikan dampak positif dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana khususnya dan program pemerintah lainnya.

##### 5. Dukungan dari suami calon akseptor.

Keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ber KB mayoritas adalah mendapat dukungan dari pada suami.

Dukungan para suami kepada isteri-isterinya agar mau ber KB adalah merupakan salah satu faktor yang menunjang adanya keberhasilan pelaksanaan program Nasional Keluarga Berencana. Karena yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan program KB adalah Pasangan Usia Subur yakni pasangan suami isteri, bukan janda dan bukan isteri ABRI yang sedang di tinggal tugas dalam relatif lama oleh suaminya. Hal ini untuk menjaga disalahgunakannya kontrasepsi tersebut.

Para suami yang melarang isterinya mengikuti Keluarga Berencana berarti tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program Nasional Keluarga Berencana, justru sebagai penghambat terlaksananya program tersebut. Oleh karena itu peran serta suami sangat diharapkan untuk mendukung isteri dalam mengikuti KB (ber KB).

Pada umumnya di Bondowoso hanya sebagian kecil saja yang mengikuti KB tanpa sepengetahuan suaminya (dengan curi-curi), yakni ketika suami pergi bekerja, misalnya kesawah ke hutan mencari kayu dan sebagainya. Lalu isteri datang sendiri ke Klinik KB untuk ber KB, khususnya pemasangan kontrasepsi IUD. Setelah suami mengetahui isterinya ber KB dan berhasil, maka suami tidak jadi melarangnya, akan tetapi justru menyetujuinya.

#### 6. Adanya kegiatan Safari KB Senyum terpadu.

Safari KB Senyum terpadu adalah salah satu faktor yang bisa menunjang keberhasilan program KB di perkotaan maupun di pedesaan. Karena dalam acara Safari KB Senyum terpadu melibatkan beberapa instansi yang ada.

Safari KB Senyum terpadu adalah suatu usaha intensifikasi program KB yang berasal dari akronis : "Sungguh Enak dan Nyaman Untuk Masyarakat", yang selanjutnya diperintah oleh Bapak Presiden menjadi "Sejahtera dan Nyaman Untuk Masyarakat", dengan maksud dapat menggerakkan peningkatan peran serta masyarakat



























### 3. Peranan Ulama' dalam pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dimaksudkan pembangunan masyarakat seluruhnya adalah meliputi pembangunan unit masyarakat terkecil yang di sebut keluarga dan meliputi pula masyarakat yang lebih luas yaitu masyarakat Kampung, masyarakat Desa, masyarakat Kota hingga masyarakat Negara dan masyarakat Dunia.

Dalam membangun suatu masyarakat, Hukum Islam meletakkan pola dasar, bahwa bangunan suatu masyarakat tersusun dari rumah tangga-rumah tangga yang berdampingan dan saling berhubungan satu sama lain. Hidup dan berkembangnya suatu masyarakat serta kondisinya bergantung kepada rumah tangga-rumah tangga yang menyusunnya.

Dari rumah tangga-rumah tangga yang tersusun serta terikat oleh hubungan sosial dan daerah tertentu, maka terjimallah Kampung, Desa, Kota, Daerah, Negara dan Dunia. Apabila rumahtangga-rumahtangga yang menyusun masyarakat itu berposisi kuat, hidup dan berkembang secara tertib dan teratur, terpelihara kualitas dan kuantitasnya masyarakatpun akan terjamin dan terpelihara pula.

Ulama' yang memiliki kepentingan sosial terutama di bidang kerohanian dan keagamaan, sangat diharapkan peranannya dalam pembangunan keluarga, pembangunan sosial dan pembangunan negara, antara lain dengan menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Agama Islam serta konsep-konsep digariskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, sebagai suri tauladan Rasulullah SAW dalam membina keluarga dan masyarakat. Kemudian Ulama' berusaha menerapkan nilai-nilai dan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat.



- f. Mengatasi krisis keluarga, thalak, Ruju' dan Iddah, antara lain Surat 4 (An Nisaa') ayat 34, 35, 128, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 240, 241, Surat 65 (At Thalaq) ayat 1, 2, 4, 5.
- g. Pemeliharaan anak yatim, antara lain Surat 6 (Al An'nam) ayat 152, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 220, Surat 17 (Al Isra) ayat 34, Surat 4 (An Nisaa) ayat 2, 4, 6, 10.
- h. Kesejahteraan ahli waris, antara lain Surat 2 (Al Baqarah) ayat 180, 181, 182, Surat 4 (An Nisaa') ayat 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 32, 33, 176.26

Dalam pembangunan sosial, Ulama' berperan dalam menggali prinsip-prinsip, nilai-nilai dan norma-norma ajaran Agama Islam yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial, kemudian memberi bimbingan dan memberi teladan pengalamannya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kepemimpinan Ulama' dalam membantu kelancaran pembangunan.

Hukum Islam dalam membangun suatu masyarakat atau pembangunan sosial mempunyai beberapa prinsip sosial yang perlu dikembangkan oleh Ulama', yang disebut DASAR PRINSIP SOSIAL yaitu Prinsip Persamaan, Prinsip Persaudaraan, Prinsip Kemerdekaan, Prinsip Kemanusiaan, Prinsip Persatuan, Prinsip Permusyawaratan, Prinsip Ketonggrogoyongan, Prinsip Keseimbangan, Prinsip Keadilan Prinsip Kemaslahatan.

Di samping itu Hukum Islam dalam pembangunan sosial metelakkan Kaidah-kaidah Sosial guna menghadapi dan mengatasi problema-problema sosial, Kaidah-kaidah sosial itu ialah :



- a. Kepemimpinan Sosial, yaitu antara lain Firman Allah Surat 3 (Ali Imran) ayat 28, 118, Surat 5 (Al Maidah) ayat 51, 57, Surat 60 (Al Mumtahanah) ayat 1, Surat 4 (An Nisaa') ayat 144, Surat 24 (An Nuur) ayat 53, Surat 9 (At Taubah) ayat 23.
- b. Hubungan-hubungan sosial, yaitu antara lain Surat 3 (Ali Imran) ayat 64, 103, 104, Surat 6 (Al An'aam) ayat 108, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 256, Surat 49 (Al Hujurat) ayat 6, 10, 11, 12, 13, Surat 58 (Al-Mujaadilah) ayat 9, 10, Surat 60 (Al Mumtahanah) ayat 8, 9, Surat 4 (An Nisaa') ayat 114, Surat 9 (At Taubah) ayat 75.
- c. Kewajiban-kewajiban sosial, antara lain Surat 3 (Ali Imran) ayat 104, 110, Surat 103 (Al 'Ashr) ayat 1, 2, 3, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 143, Surat 90 (Al-Balad) ayat 10, 20, Surat 5 (Al Maidah) ayat 8, Surat 16 (An Nahl) ayat 125, Surat 4 (An Nisaa') ayat 58, 135.
- d. Perubahan sosial, antara lain Surat 3 (Ali Imran) ayat 112, Surat 8 (Al Anfal) ayat 53, Surat 7 (Al-A'raf) ayat 96, Surat 11 (Hud) ayat 117, Surat 7 (Al Isra) ayat 16, Surat 16 (An Nahl) ayat 112, Surat 28 (Al Qashash) ayat 59, Surat 13 (Ar Ra'd) ayat 11, Surat 30 (Ar Ruum) ayat 41, Surat 10 (Yunus) ayat 24.
- e. Prasarana kemakmuran masyarakat, antara lain surat 6 (Al An'aam) ayat 99, 141, 142, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 29, Surat 15 (Al Hijr) ayat 19, 20, 21, 22, Surat 22 (Al Hajj) ayat 63, 64, 65, Surat 14 (Ibrahim) ayat 32, 33, 34, Surat 17 (Al Isra) ayat 66, surat 45 (Al Jaatsiyah) ayat 12, 13, Surat 67 (Al Mulk) ayat 15, Surat 16 (An Nahl) ayat 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Surat 13 (Ar Ra'd) ayat 133, Surat 55 (Ar Rahman) ayat 10, 11, 12, 19, 21, 24, 25, Surat 42 (Asy Syuura) ayat 28.
- f. Kesejahteraan sosial, antara lain Surat 3 (Ali Imran) ayat 14, 130, Surat 7 (Al A'raaf) ayat 26, 32, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 168, 188, Surat 17 (Al Isra), ayat 70, Surat 4 (An Nisaa') ayat 29.



80,08 %, IUD: 18 %, LL: 1,02 %), (PIL: 81 %, IUD: 14 %, LL: 4 %), (PIL: 61 %, IUD: 35,05 %, LL: 3,05 %) lebih jelasnya dan untuk KB aktif lihat lampiran).

Dari data di atas dapatlah dinyatakan bahwa pengikut KB di Kabupaten Bondowoso ternyata tidak bertentangan Fatwa MUI tentang Keluarga Berencana. Di samping itu dalam pelaksanaan program KB para Ulama' di Kabupaten Bondowoso selalu ikut berperan aktif terutama dalam pelebagaan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera dan pendewasaan usia kawin bagi generasi muda. Masyarakat Kabupaten Bondowoso kebanyakan menerima tentang pelaksanaan program KB, tidak pernah para petugas formal (BKKBN) ataupun informal mendengar suara masyarakat yang menentang pelaksanaan program KB.

Keberhasilan pelaksanaan program KB di Kabupaten Bondowoso adalah didukung oleh beberapa faktor, adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menurut penulis tidak bertentangan dengan Hukum Islam, tetapi justru banyak menampilkan kemaslahatan umat seperti Safari KB Senyum Terpadu yang kegiatannya melibatkan beberapa Instansi (lintas sektoral) dan Program Pelayanan terpadu (Proyandu/Proyandu Plus) terutama bagi mereka yang minus ekonominya.

Sebagaimana dalam kegiatan proyandu (program pelayanan terpadu) ada lima kegiatan yang dilaksanakan dalam sekali pertemuan yakni :

1. Pelayanan Emonisasi
2. Pelayanan Ibu hamil
3. Pelayanan Keluarga Berencana

















orang yang berbuat kerusakan".<sup>42</sup>

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim mengingatkan:

من سمع ابن أبي وقاص قال النبي (ص) إن فذر ورفك  
أفنياً خير من أن فذرهم ماله يتكففون الناس.

Artinya: "Dari Sa'id Ibnu Abi Waqas sabda Nabi saw. sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli waris mu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak".<sup>43</sup>

Kalau kita lihat keterangan di atas pelaksanaan Keluarga Berencana hanya bermotivasi materiil (pembayaran hidup), dan hal ini seolah-olah mengurangi iman kita kepada Firman Allah dalam Al Qur-an Surat II (Hud) ayat 6 :

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها . . . . . ( الآية )

Artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya".<sup>44</sup>

Tetapi sebenarnya pelaksanaan Keluarga Berencana , juga bermotivasi Agama, sebagaimana dikatakan Bapak Prof. DR. H.A. Mukti Ali: Terlaksananya KB bermotivasi Agama. Agama yang mendorong kita untuk melaksanakan KB, sedangkan pembiayaan itu adalah salah satu faktor pokok atau salah satu keterangan lahir yang telah diungkapkan oleh Agama kita. Buktinya atau hakekatnya Agamalah yang merupakan sentral pemantap, atau Agamalah yang merupakan motivasi terpokok.<sup>45</sup>

Kata-kata "daabbah (yang merayap)" itu berarti binatang dan bisa juga termasuk manusia, semua itu Tuhanlah yang memberi rizkinya. Karena manusia tidak mem-

<sup>43</sup>Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Mesir: 'Isa Al-Babi Al-Halabi), hal. 12.

<sup>44</sup>Departemen Agama RI., Op.cit., hal. 327.











Pengertian KB apabila diartikan pembatasan turunan/anak (Tahdidun Nasl) berarti melanggar hak ibu bapak. Tetapi apabila KB diartikan tanzhimun Nasal (perencanaan turunan atau anak)maka lebih banyak menonjolkan hak-hak anak dan masyarakat, di dalamnya termasuk kepentingan ibu bapak yang bersangkutan.

Di dalam hal ini, dapat dikemukakan firman Allah di dalam Surat 66 (At Tahrim ) ayat 6 :

..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا  
( آية )

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan neraka".<sup>55</sup>

Meskipun tujuan ayat ini pada mulanya memelihara diri dan keluarga dari neraka di akherat, tetapi adalah kewajiban pula bagi muslim untuk memelihara diri dan keluarga (anak-anak) dari neraka dunia yang sangat pahit dan berat pikulannya. Baik diri kita sebagai ibu bapak ataupun anak-anak sebagai keluarga, haruslah dihindarkan dari bencana peledakan penduduk yang tidak terkendalikan, yang menyebabkan kesukaran - kesukaran bagi hidup ibu bapak itu sendiri dan bagi anak yang di lahirkan.

Secara umum demi kepentingan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, Allah berfirman dalam surat 8 (Al Anfal) ayat 25 :

وَاتَّقُوا نَفْسَ لَأْتَمَّهِتَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً .. (الآية )

Artinya: "Dan peliharalah dirimu daripada siksaan (bencana) yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu".<sup>56</sup>

Dunia merasakan bahwa peledakan penduduk karena kelahiran yang tidak direncanakan, menyebabkan timbulnya bencana yang tidak terkirakan. Bencana kekurangan makan dan kelaparan bukan hanya menimpa orang-orang yang menimbulkan fitnah (bencana) itu saja, tetapi seluruh umat bangsa bahkan seluruh dunia merasakan bahayanya.

Dengan demikian bukan lagi titik beratnya kepada ibu, bapak dan anak, tetapi juga kepada seluruh umat (bangsa dan manusia) yang ikut menderita bencananya. Dengan mengemukakan tiga macam hak, yakni hak anak, hak ibu bapak, dan hak masyarakat (bangsa dan manusia seluruhnya) adalah lebih mantap untuk mencegah ledakan penduduk.

#### 4. Pencegahan kehamilan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan penggunaan sejumlah alat kontrasepsi.

Dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Indonesia dengan usaha pencegahan kehamilan tanpa alat dan memakai alat kontrasepsi, dikalangan umat Islam diantaranya masih ada yang pro dan kontra, ada yang mengatakan ikut KB itu perlu dengan menggunakan alat kontrasepsi dan ada yang berpendapat tidak perlu dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Usaha pencegahan kehamilan yang dikembangkan pemerintah dalam hal ini BKKBN di masyarakat adalah pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi















